

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa sejarah tidak akan lepas dari tiga unsur utama yakni manusia, tempat dan waktu. Bagian ini akan mendeskripsikan unsur yang disebut kedua. Meski demikian penulis tidak bermaksud untuk terjerumus ke dalam kubang determinisme geografis, ketika menyatakan bahwa banyak peristiwa sejarah di Aceh dipengaruhi oleh unsur alam.¹ Diakui atau tidak, alam Aceh memang banyak mempengaruhi wajah sejarahnya, sehingga konsep posibilisme geografis dianut dalam tulisan ini. Ambillah bukti sederhana, peristiwa tsunami 26 Desember 2004 berpengaruh besar terhadap proses perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Republik Indonesia (RI). Besar kemungkinan meski sejarah tidak mengenal kata mungkin tanpa terjadinya tsunami, perdamaian tidak akan pernah terjadi.²

Bila ditarik jauh mundur ke belakang pada masa Sultan Iskandar Muda, Lombard telah menunjukkan bahwa faktor alam banyak mempengaruhi meski dengan tegas Lombard tidak mendukung determinisme geografis sejarah Aceh kala itu, semisal bencana banjir, kebakaran, dan tidak ketinggalan gempa. Rupanya gempa sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Aceh, bahkan “setiap tahun biasa ada tiga empat gempa” saat itu.³ Melompat ke masa Perang Aceh 1873-1912, tergambar jelas bahwa gejala alam yang kita

¹N. Daldjoeni, *Geografi Kesejarahan I (Peradaban Dunia) Bandung*, Penerbit Alumni, 1987, hal 5.

²Denys Lombard., *Kerajaan Aceh Zaman Sultas Iskandar Muda (1607-1636)* Jakarta, KPG Forum Jakarta-Paris, dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2006, hal 69.

³Beaulieu dalam Lombard, *Ibid*, hal78.

namakan hujan juga turut mempengaruhi jalannya pertempuran antara pemerintah Hindia Belanda dengan gerilyawan Aceh.

Alam Aceh memang dikaruniai dengan berbagai macam keistimewaan dan kekayaan alam yang tragisnya juga mengundang pertikaian. Teristimewa adalah posisi geografisnya yang strategis, terletak di persimpangan jalan laut yang ramai, yang menghubungkan Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan. Tepat di persimpangan dua budaya besar dunia yaitu India dan China. Potensial sebagai tempat *rendezvous* bagi para pelayar, sekaligus strategis sebagai sarang perompak untuk menghadang kapal-kapal kaya. Mengingat posisi Aceh yang berada di ujung barat nusantara, negeri ini juga menjadi gerbang pertama yang harus dilalui jamaah haji ketika berangkat ke tanah suci melalui jalur laut. Maka negeri ini pun sempat memiliki julukan yang terkenal sebagai Serambi Mekah.⁴

Secara geografis negeri ini melintang dari barat laut ke tenggara, dan dibelah menjadi dua oleh rangkaian bukit barisan. Sebelah barat pegunungan itu terletak daerah sempit dengan hutan yang lebat, dipenuhi bukit yang sukar dilalui dan daerah yang curam ditepi laut. Daerah yang subur dan terhampar luas adalah daerah sebelah timur yang menjadi daerah pertanian yang kaya hasil padi.⁵ Luas daerah yang secara administratif RI dinamakan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ini memiliki luas wilayah 57.365,57 km. Termasuk ke dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil sepanjang pantai barat, 35 gunung mulai dari Leuser, Anu, Abong-Abong, Tangga,

⁴Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949* Jakarta, UI-Press, 1999, hal 15.

⁵Teuku Syamsuddin, *"Kebudayaan Aceh" Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, ed.Koentjaraningrat , Jakarta, Djambatan, 2002, hal229.

Ulumasem, dan dua danau yaitu Laut Realoih dan Laut Tawar serta 73 sungai yang diantaranya adalah Krueng Acehm Krueng Tripa, Krueng Peusangan, dan Krueng Jamboaye. Meski secara geografis pada umumnya Aceh terdiri dari daerah yang ditumbuhi banyak bukit yang sukar untuk dilalui, namun kenyataannya justru menjadi berkah sebagai basis pertahanan dan daerah operasi gerilyawan. Kenyataan ini telah terbukti jelas ketika masa Perang Aceh ataupun masa-masa pertikaian GAM-RI.

Isi perut tanah Aceh juga sangat kaya akan sumber daya alam. Misalnya, negeri ini kaya akan *Liquefied Natural Gas* (LNG). Produk LNG di Aceh pada awal tahun 1990-an mencapai 40% dari seluruh produksi dunia. Tambahan pula, pada 1991 hampir 90% hasil produk pupuk Aceh diekspor.⁶ Celaknya kekayaan alam Aceh tidak berbanding lurus dengan kekayaan rakyat Aceh. Kondisi yang demikian memunculkan deprivasi relatif yang mendorong gerakan untuk melawan ketidakadilan yang mengejawantah dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka.

Bicara GAM, mau tak mau, harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Dibawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan. Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh

⁶Sarah Nuraini Siregar, "*POLRI dan Pengelolaan Keamanan Pasca MoU Helsinki*" *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, ed.Ikrar Nusa Bhakti (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008) hal 261.

Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. "Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir".⁷

Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini kantor gubernur). Teuku Nyak Arief Gubernur di bumi Serambi Mekkah tetapi ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang *Cumbok* yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946. Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh.⁸

Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh tetapi meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan

⁷ Ibid, Sarah Nuraini Siregar

⁸ M.H. Skelely Lulofs, *Cut Nyak Din Kisah Ratu Perang Aceh*, Depok, Komunitas Bambu, 2007, hal 9

Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat. Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa Indonesia. Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis⁹. Aceh juga menyumbang emas lantaran untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.

Setahun berlangsung, kekecewaan mulai tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah, apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi. Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam¹⁰. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo. Dari sinilah lantas Beureueh

⁹ Ibid, M.H. Skelely Lulofs

¹⁰ Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta, P2P-LIPI dan Pustaka Pelaja, 2008, hal7

melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenal pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro terhadap Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa¹¹.

Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).

GAM lahir di era Soeharto¹². Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat.

¹¹ Ibid ikrar Nusa Bhakti

¹²Teuku Syamsuddin, "*Kebudayaan Aceh*" *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, ed.Koentjaraningrat , Jakarta, Djambatan, 2002, hal239

Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata. Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayangnya, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM. Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi¹³. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara¹⁴. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.

Memiliki pabrik senjata dan berlatih di Libia setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun.

¹³ Ibid Tengku syamsuddin

¹⁴ <http://www.kumpulansejarah.com/sejarah-lahirnya-gerakan-aceh-merdeka.html>

Pada deadline maklumat pemerintah 12 Mei 2003, hingga batas waktu ultimatum, pemerintah tak juga mengeluarkan keputusan sebagai tanda awal operasi militer ke Aceh. Konon, saat itu pemerintah menghitung kekuatan TNI di sana. Ada kekhawatiran, TNI bakal dilibas GAM melalui perang gerilya.

Secara tidak langsung, kabar ini menyiratkan ketangguhan kekuatan bersenjata GAM. Sesungguhnya jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. Filosofinya begini, jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan dan hal seperti inilah yang terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Perlawanan GAM mendapat simpati luar biasa dari rakyat Aceh, rakyat yang lama ternista dan teraniaya. Panglima Tertinggi GAM dan Wakil Wali Negara Aceh Tengku Abdullah Syafei (alm) sempat mengatakan, bayi-bayi warga Aceh telah disediakan senjata AK-47 oleh GAM. Mereka akan dididik dan dilatih sebagai tentara GAM dan segera pergi berperang melawan TNI.

Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Tetapi, kerap GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat markas utamanya. Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia,

Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dibawah panglima wilayah. Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Setidaknya tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di camp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan.¹⁵

Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di camp militer di Kandahar, Afghanistan pimpinan Osama bin Laden. Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990. Selama Daerah Operasi Militer (DOM), pengiriman tersendat. Tetapi, angkatan 1995-1998 sudah mendapat latihan intensif. Ketika DOM dicabut, prajurit dari Libia ini ditarik ke Aceh.

Jumlahnya sekitar 5.000 personel dan dijadikan pasukan elite GAM (semacam Kopassus). Jalur ke Libia memang agak mudah. Dari Aceh, para pemuda Aceh itu dikirim melalui Malaysia lalu menuju Libia. Jalur lainnya dari Aceh lalu ke Thailand menuju Afghanistan dan melanjutkan ke Libia. Dari jalur ketiga, yakni melalui Aceh menuju Filipina Selatan dan ke Libia. Tiga jalur penting ini hampir selalu lolos dari jangkauan petugas imigrasi, polisi, dan patroli TNI-AL. Di era Syafei hingga sekarang dipegang Muzakkir Manaf, personel GAM terdiri atas pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan inong baleh (pasukan janda korban DOM) dan karades (pasukan khusus) serta Lasykar Tjut Nyak Dien (tentara wanita). Wakil Panglima GAM Wilayah

¹⁵<http://www.intelijen.co.id/sejarah-lahirnya-gerakan-aceh-merdeka/>.

Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.

Sumber resmi Mabes TNI cuma menyebut sekitar enam ribu orang. Mantan Menhan Machfud MD menyebut 4.869 personel. Dari jumlah itu, 804 di antaranya belajar di Libia dan 115 dilatih di Moro, Filipina. Persediaan senjatanya terdiri atas pistol, senapan, GLM, mortir, granat, pelontar granat, pelontar roket, RPG, dan bom rakitan. Jenis senapan di antaranya AK-47, M-16, FN, Colt, dan SS-1. Ada jalur internasional yang menyuplainya senjata tersebut. Sejumlah negara disebut antara lain, gerakan separatis Pattani Thailand, Malaysia, gerakan Islam Moro Filipina, eks pejuang Kamboja, gerakan separatis Sikh India, gerakan Elan Tamil, dan Kazhakstan serta Libia dan Afghanistan. GAM juga membuat pabrik senjata. Di antaranya, di Kreung Sabe, Teunom Aceh Barat dan di Lhokseumawe dan Nisau-Aceh Utara serta di Aceh Timur. Jenis senjata yang diproduksi seperti bom, amunisi, senjata laras panjang dan pendek, pabrik senjata ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kondisi medan. Jika akan diserbu TNI, pabrik senjata telah dipindahkan ke daerah lain. Para ahli senjata disekolahkan ke Afghanistan dan Libia.¹⁶

Senjata-Senjata GAM juga berasal dari Jakarta dan Bandung. Pasar gelap senjata ini dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang haus kekayaan. Bagi GAM, asal ada senjata, uang tidak masalah. Sebab, faktanya GAM ternyata memiliki sumber dana yang sangat besar. Jumlah pembelian ke oknum

¹⁶ Eddy pratono.2011.PT alummni,Bandung

TNI/Polri ini bisa trilyunan rupiah. Sebuah penggerebekan tahun 2000 oleh Polda Metro Jaya sempat menemukan kuitansi Rp 3 milyar untuk pembelian senjata GAM di pasar gelap dari oknum TNI. Kini, senjata yang dimiliki TNI juga dimiliki GAM¹⁷.

Yang tak dimiliki GAM adalah senjata berat. Sebab, sifatnya yang lamban. Prinsip GAM, senjata itu harus memiliki mobilitas tinggi, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab, strategi perangnya yang hit and run. GAM bahkan mengaku memiliki senjata yang lebih modern daripada TNI. Misalnya, senjata otomatis yang dimiliki para karades. Senjata otomatis, berbentuk kecil mungil itu bisa tahan berhari-hari dalam air. Anggota karades inilah yang biasa menyusup ke kota-kota dan menyergap anggota TNI/Polri yang teledor.

Membeli senjata tentu dengan uang melimpah. Sebab, harganya yang tak murah. Lantas, dari mana mereka mendapatkan dana? GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri. Di antaranya, di Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Dana juga didapatkan dari sumbangan wajib yang diambil dari perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Aceh. Sebagai gambaran, tahun 2000 lalu, GAM meminta sumbangan wajib kepada seorang pengusaha lokal bernama Tengku Abu Bakar sebesar Rp 100 juta. Abu Bakar diberi surat berkop Neugara Atjeh Sumatera tertanggal 15 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Panglima GAM Wilayah Aceh Rajek Tengku Tarzura. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut Pupuk Iskandar Muda pernah menyeteror Rp 10 milyar ke GAM untuk biaya keamanan. GAM kerap melakukan

¹⁷ Ibid, Eddy pratono

gangguan bila tidak mendapatkan sumbangan wajib tersebut¹⁸. Makanya, setiap bulan, GAM mendapat upeti dari para pengusaha “sahabat GAM” itu. Sistem komunikasi GAM juga sangat canggih.

Sistem komunikasi berlapis dilakukan GAM sebagai benteng pertahanan dan propaganda. Selain handytalky, GAM juga memiliki radio tranking, radar dan telepon satelit. GAM juga memiliki penyadap telepon. Acap kali gerakan TNI/Polri dimentahkan aksi-aksi penyadapan ini. Penggerebekan sering kali gagal total.

Sistem organisasinya yang disusun dengan sistem sel juga membantu GAM survive. Tidak mudah menemukan markas GAM. Meski, ada sebagian anggota GAM yang ditangkap. Antara anggota dan pejabat satu dengan yang lain kadang tidak berhubungan, tidak saling mengenal. Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Shalahuddin Al Fatah menuturkan, sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang. Tetapi, rakyat Aceh tidak pernah ditaklukkan. Fakta sejarah pula, gerakan rakyat Aceh menentang pusat tidak pernah menang. Tetapi, TNI tidak pernah bisa menaklukkan mereka¹⁹.

Keterlibatan pihak ketiga yang paling baik dan efektif adalah apabila kehadirannya terjadi karena memang diperlukan dan berhasil membantu para pemimpin setiap pihak yang terlibat konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan kerjasama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau

¹⁸ <http://holan-hukum.blogspot.com/p/gerakan-aceh-merrdeka-gam.html>

¹⁹ M.H. Skelely Lulofs, *Cut Nyak Din Kisah Ratu Perang Aceh*, Depok, Komunitas Bambu, 2007, hal 10.

diinginkan lagi. Tidak ada strategi pendekatan keterlibatan pihak ketiga yang paling baik dalam resolusi konflik, karena fungsi keberadaannya hanyalah merupakan kompensasi bagi adanya kekurangan yang ada dalam perselisihan atau konflik itu. Karenanya, pihak ketiga harus berupaya menyediakan obat sebanyak jumlah penyakit yang ada, obat yang akan menyembuhkan masyarakat atau kelompok dari penyakit konflik negatif.²⁰

Tetapi itu bukan berarti bahwa keterlibatan pihak ketiga sama sekali tidak memiliki pola. Amatlah penting untuk memilah berbagai kemungkinan taktik pihak ketiga, mulai dari yang paling ringan sampai skala terberat. Dalam skala ringan, banyak memfasilitasi berbagai aktifitas yang disandarkan pada kemampuan taktik berkomunikasi. Pihak ketiga merancang pertemuan pihak-pihak yang terlibat konflik, mencoba meningkatkan kepemimpinan mereka, atau setidaknya, mentransmisikan pesan diantara mereka. Dalam skala moderat, aktifitas ditekankan pada taktik formulasi dimana pihak mediator menentukan struktur agenda, mempengaruhi cara pandang baru terhadap berbagai isu yang ada dan menyediakan berbagai kemungkinan penyelesaian konflik.

Dalam skala berat, pihak ketiga melakukan kontrol dimana kemampuan dalam manipulasi taktik sangat diperlukan, jika perlu, pihak ketiga melakukan penekanan atau ancaman, sogokan atau hal lain yang mampu menekan para pelaku konflik untuk membuat berbagai kesepakatan atau kompromi.

²⁰ Ibid M.H. Skelely Lulofs

Intervensi pihak ketiga harus melahirkan hasil-hasil yang inovatif²¹. Untuk itu, Fisher mensyaratkan empat strategi penting yang harus dilakukan menimbulkan motivasi positif yang saling mutualistis yaitu dengan menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur, mendiagnosa berbagai isu dan proses konflik, dan membuat aturan interaksi melalui rangkaian kerjasama *problem solving*.

Dari uraian di ataslah yang mendorong penulis dalam pemaparan laporan skripsi ini dan memilih judul “**PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KESEPAKATAN PERJANJIAN DAMAI ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN REPUBLIK INDONESIA**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan yang telah di uraikan pada latar belakang sebelumnya , maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik internal suatu negara yang bersifat separatis ?
2. Apa kendala-kendala dalam proses penyelesaian konflik GAM-RI ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas,maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran hukum internasional serta ikut sertanya negara lain dalam menyelesaikan konflik separatis.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian konflik GAM-RI.

²¹ Ibid M.H.Sekelely Lulofs

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan salah satu sejarah besar yang dialami negara ini yaitu usaha melepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipelopori oleh Gerakan Aceh Merdeka.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga pendidikan

Dalam hal ini khususnya Fakultas Hukum unissula untuk menambah perbendaharaan yang berkaitan dengan GAM secara khusus, secara umum supaya menambah perbendaharaan mengenai sejarah panjang Indonesia mengenai isu separatisme serta penyelesaiannya.

b. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang belum diketahui tentang peran penting hukum internasional dalam membantu mempertahankan keutuhan Indonesia dari gerakan separatisme melalui GAM.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan motivasi kita dalam melakukan penelitian di bidang hukum internasional khususnya kajian mengenai gerakan separatisme di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian untuk mengumpulkan data sesuai kehendak peneliti. Sebagai dasar pertama, penulis menggunakan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Untuk masalah yang hendak diteliti, penulis menggunakan metode pendekatan yang berbentuk yuridis normatif. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum-hukum dan norma-norma yang sesuai atau ada kaitannya dengan judul skripsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah dalam penelitian ini, analisa data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.²²

Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga deskriptif-analitis di sini yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan dalam hukum internasional yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat internasional, dimana selanjutnya diadopsi oleh Republik

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal 38.

Indonesia dimana dalam hal ini dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

3. Sumber data dan bahan hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data sekunder.

Data Sekunder merupakan penelitian hukum normatif yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, mempunyai kekuatan hukum yang berupa perundang-undangan, makalah dan lain-lain, sebagai bahan hukum penunjang. Bahan hukum sekunder penulis peroleh melalui penelitian ke perpustakaan.

Bahan hukum penulis peroleh melalui kepustakaan yang berupa :

- *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*, berlaku 2 Juni 2000-15 Januari 2001.
- Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada 8 Maret 2001.
- Instruksi Presiden No.4/2001 tentang Langkah Menyeluruh untuk Penyelesaian Masalah Aceh.
- *Cessation on Hostilities Agreement (CoHA)*, Jenewa 9 Desember 2002.
- Keputusan Presiden No.18/2003, status darurat militer di Aceh.
- Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang 1949.
- MoU Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak terikat terdiri dari : Buku, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian yang merupakan penunjang dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi beberapa bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan mengenai sejarah dan perkembangan hukum internasional, awal mula tujuan GAM, dan serta pengertian mengenai separatis.

BAB III : Hasil Penelitian

bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu: peran hukum internasional dalam penyelesaian kesepakatan perjanjian damai antara gerakan Aceh merdeka dengan Republik Indonesia dan kendala – kendala dalam proses penyelesaian konflik.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.